

**ANALISIS SIKAP POLITIK DPRD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2010**

TERHADAP RUUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY)

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nama: Nina Nurani Afiari

NIM: 20080520009

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2012

**ANALISIS SIKAP POLITIK DPRD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2010**

TERHADAP RUUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

NINA NURANI AFIARI

20080520009

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2012

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Dengan Judul:

ANALISIS SIKAP POLITIK DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010

TERHADAP RUUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY)

Oleh:

NINA NURANI AFIARI

20080520009

Telah Dipertahankan dan disahkan di Depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/Tanggal: 10 Agustus 2012

Tempat: Ruang Sidang Fisipol

SUSUNAN TIM PENGUJI

KETUA

Drs. Juhari Sasmita Aji, M.Si

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

(Tunjung Sulaksono S.IP. M.Si)

(Dra. Atik Septi Winarsih M.Si)

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Suranto, M.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut referensinya. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2012

Nina Nurani Afiari
No. Mhs. 20080520009

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah-mu lah hendaknya kamu berharap”. **(QS Al-Insyiroh: 6-8)**

“Barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami”. **(QS. Al-Ankbut: 69)**

Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diilhami oleh cinta dan dibimbing oleh pengetahuan. **(Betrand Russel)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu. karena do'a dan dukungan yang tidak pernah putus dari kalianlah akhirnya karya kecil ini dapat aku selesaikan.*
- ❖ *Kakak-kakakku dan adekku, terima kasih atas segala nilai hidup yang kalian berikan, sehingga aku dapat berjalan pada titik kedewasaan.*
- ❖ *Tunanganku Muhammad Siddiq, terima kasih atas cinta dan kasih, do'a, dukungan, pengertian dan untuk tiap detik kebersamaan kita.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sikap Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Terhadap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi kasus: pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY)”**

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi ketentuan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. HM. Dasron Hamid, Msc. selaku rektor Unuversitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Suranto, M.Pol. selaku Ketua Jurusan IlmuPemerintahan.
3. Ibu Erni Zuhriyati, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Juhari SA.M.Si. selaku dosen pembimbing.

5. Bapak Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si. selaku penguji I skripsi.
Terimakasih atas semua kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini.
6. Ibu Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si selaku penguji II skripsi.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang Bapak/Ibu berikan pada penulis.
8. Bapak, Ibu, Kakak dan adik tercinta, serta keluarga besar terimakasih atas do'a dan supportnya.
9. Muhammad Siddiq, terimakasih atas cinta dan kasihnya, dukungan yang tiada henti dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan '08 yang selama ini mau saling memberi semangat dan berbagi informasi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak khususnya yang memerlukan guna pengembangan ilmu pengetahuan. Penyusun juga menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, sama halnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Agustus 2012

Penulis,

Nina Nurani Afiari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
SINOPSIS.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Dasar Teori.....	12
1. Sikap Politik.....	13
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
3. Daerah Istimewa.....	22
4. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.....	28
E. Definisi Konsepsional.....	34
F. Definisi Operasional.....	35
G. Metode Penelitian.....	37
BAB II. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	42
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul.....	42
1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Bantul.....	42

2. Kondisi Geografi dan Demografi.....	45
B. Profil DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014.....	47
1. Kedudukan, Tugas, Wewenang serta Hak-Hak DPRD.....	47
2. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Bantul.....	50
3. Alat Kelengkapan DPRD.....	55
BAB III. SIKAP POLITIK DPRD KABUPATEN BANTUL TERHADAP RUUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	68
A. Profil dan Eksistensi RUUK DIY.....	71
B. Sikap Politik DPRD Kabupaten Bantul Terhadap RUUK DIY.....	75
1. DPRD Menerima Isu yang Berkembang Dimasyarakat terkait RUUK.....	75
2. DPRD Merespon Aspirasi Masyarakat Terkait RUUK.....	77
3. DPRD Menghargai Aspirasi Masyarakat Terkait RUUK.....	79
4. DPRD bertanggungjawab Terhadap Sikap Politiknya Terkait RUUK.....	86
C. Sikap Politik DPRD Kabupaten Bantul Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.....	88
1. DPRD Menerima Isu yang Berkembang Dimasyarakat Terkait Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	89
2. DPRD Merespon Aspirasi Masyarakat Terkait Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	90
3. DPRD Menghargai Aspirasi Masyarakat Terkait Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	92
4. DPRD Bertanggungjawab Atas Sikap Politiknya Terkait Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	95
BAB IV. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian
2. Piagam Pernyataan Sikap
3. Majalah BIWARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggota DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan Klasifikasi Partai.....	52
1.2 Data Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan Klasifikasi Fraksi.....	53
1.3 Susunan dan Personalia Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul.....	57
1.4 Susunan dan Personalia Badan Musyawarah.....	61
1.5 Susunan dan Personalia Badan Kehormatan.....	62
1.6 Susunan dan Personalia Badan Anggaran.....	66

SINOPSIS

Perdebatan antara Pemerintah Pusat Presiden SBY dengan Pemerintah DIY seputar terapan sistem yang harus dilakukan di DIY. Pemerintah Pusat menginginkan salah satu prinsip demokrasi presidensial dalam Pemilihan Umum yang bersifat “langsung“ juga diterapkan di Provinsi DIY untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sama seperti yang dilakukan disetiap Daerah di Indonesia. Namun pandangan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat Yogyakarta yang tetap menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan adalah Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang bertahta. Hal ini mendapat perhatian penuh dari DPRD Bantul selaku lembaga dewan perwakilan rakyat di Kabupaten Bantul untuk merespon secara positif keinginan rakyat yang diwakilinya melalui rapat paripurna DPRD Bantul untuk menyatakan sikap politiknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menganalisis bagaimana sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap RUUK DIY tahun 2010 pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek-subyek berdasarkan fakta sebagaimana adanya untuk diambil kesimpulan secara umum. Metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui sikap politik DPRD Kabupaten Bantul tahun 2010 terhadap RUUK DIY, maka dalam penulisan skripsi ini yang menjadi nara sumber adalah anggota DPRD atau ketua fraksi serta staff humas DPRD Bantul.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik DPRD Kabupaten Bantul mendukung sepenuhnya keistimewaan DIY, terlebih pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan sikap masing-masing fraksi, enam dari tujuh fraksi yaitu fraksi PDI, Golkar, PAN, PKS, PPP dan Karya Bangsa mendukung melalui mekanisme penetapan, sedangkan fraksi partai Demokrat tidak bersikap. Hasil dari rapat paripurna tersebut kemudian disampaikan ke DPR-RI untuk dijadikan masukan bagi DPR-RI dalam mengesahkan RUUK DIY.

Oleh karena itu, untuk menjaga sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap RUUK terlebih pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, maka DPRD harus tetap memperjuangkan aspirasi rakyat sampai pada titik penghabisan. DPRD Kabupaten Bantul harus mampu mempertahankan sikapnya untuk tetap mendukung keistimewaan DIY, DPRD juga harus mampu menjadikan dan menjaga Yogyakarta tetap istimewa.